

PENDIDIKAN INKLUSI

Siti Saroh, M.Pd.



PENDIDIKAN INKLUSI

QRCBN: 62-512-4870-715

Penulis: Siti Saroh, M.Pd.

Editor: Hati Nurahayu, S.Pd.

Penerbit: Tata Akbar

Redaksi:

Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat

Surel: penerbittataakbar@gmail.com

Kontak : 081282180370

Tebal 77 halaman

Ukuran 14,8 cm X 21 cm

Bookpaper, Glossy double laminating

Hak Cipta Dilindungi UndangUndang

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Subhaanallaahu” Wata’ala, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul Pendidikan Inklusi. Di mana pendidikan inklusi sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.

Ada beberapa cara menerapkan dan bagaimana mendirikan sekolah inklusi ada dalam satu buku ini yang akan diterapkan di sekolah lainnya. Dalam memberikan sarana bagi siswa yang memerlukan bimbingan khusus dari adanya Pendidikan Inklusi.

Banyak pihak yang membantu dalam terbitnya buku ini, semua saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka dengan tujuan memperbaiki lebih baik lagi dari buku ini.

Jakarta, Januari 2023

DAFTAR ISI

PRAKATA ...	3
DAFTAR ISI ...	4
BAGIAN 1 PEMBUKA ...	6
BAGIAN 2 PENDIDIKAN INKLUSI ...	10
BAGIAN 3 PRINSIP-PRINSIP PENTINGNYA PEGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI ...	13
BAGIAN 4 PEDOMAN PENDIDIKAN INKLUSI ...	15
BAGIAN 5 KOMPONEN - KOMPONEN PENDIDIKAN INKLUSI ...	17
BAGIAN 6 BEBERAPA PENELITIAN PENDIDIKAN INKLUSI ...	25
BAGIAN 7 PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH ...	31
BAGIAN 8 DESAIN SKENARIO PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI ...	37
BAGIAN 9 UPAYA UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM INKLUSI ...	67
BAGIAN 10 PENUTUP ..	69
DAFTAR PUSTAKA ...	72
BIONARASI PENULIS ...	77

Bagian 1

PEMBUKA

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Jika suatu bangsa pendidikannya rendah maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang tertindas dan terbelakang pemikirannya dan kesejahteraannya, karena itulah tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada warga negaranya, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara Indonesia dapat terwujud dengan melalui Pendidikan.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bab IV, pasal 5 ayat 1 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan negara dan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 maka pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah Indonesia berusaha mencegah masyarakatnya dari kebodohan dan kemiskinan. Wajib belajar yang dicanangkan pemerintah tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan yang sama untuk semua jenjang pendidikan. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tersebut dinamakan pendidikan.

Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan sebagai jembatan bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan untuk semua dapat terealisasi. Program pendidikan inklusi merupakan implementasi dari Surat An-Nur ayat 61.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kalian sendiri, atau di rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian, di rumah saudara-saudara kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di rumah saudara bapak kalian yang laki-laki, di rumah saudara bapak kalian yang perempuan, di rumah saudara ibu kalian yang laki-laki, di rumah saudara ibu kalian yang perempuan, di rumah yang kalian miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawan kalian.

Tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kalian memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini), hendaklah kalian memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada diri kalian sendiri sebenar-benarnya salam yang dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (-Nya) bagimu, agar kamu mengerti (Qs. An-Nur ayat 61).

Al-quran menjelaskan Allah memerintahkan kita dapat duduk bersama dengan mereka yang memiliki cacat tubuh. Allah SWT menciptakan manusia agar hidup rukun tanpa membedakan warna kulit atau fisik seseorang. Hal ini sebagai kekuatan hukum bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan layaknya seperti anak yang memiliki fisik yang normal.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di dalamnya terkandung makna bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk bersekolah. Pendidikan Inklusi mendapat kekuatan hokum dari pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) di dalamnya tercantum tentang tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa memandang fisik atau maupun latar belakangnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan fisiknya. Untuk mewujudkan amanat peraturan menteri pendidikan nasional tersebut maka program pendidikan inklusi harus terealisasi, agar anak berkebutuhan khusus dapat memiliki jiwa mandiri dan memiliki rasa percaya serta dapat berprestasi sesuai dengan kelebihan yang dimiliki berkebutuhan khusus tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan tersebut direspon oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengintruksikan agar sekolah negeri yang ditunjuk untuk menerima anak berkebutuhan khusus, tidak dibenarkan menolak anak yang akan masuk ke sekolah tersebut. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memberikan peluang serta kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler mulai dari TK, SD, SMP, SMU dan SMK. Dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), anak berkebutuhan khusus tidak ada batasan kuota, sistem penerimaannya melalui online yaitu melalui jalur inklusi, dan waktu pelaksanaannya sebelum penerimaan peserta didik baru reguler. Respon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi membuat sekolah reguler harus menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan menurut M.J.Langeveld “Pendidikan adalah merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan adalah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akhil baliq, dan bertanggung jawab secara susila. Buku Manajemen menjelaskan definisi pendidikan menurut Langevell yang dikutip oleh Husaini Usman, Pendidikan adalah memanusiakan manusia.

BAGIAN 2

PENDIDIKAN INKLUSI

Pengertian pendidikan inklusi sangat beragam. Menurut Staub dan Peck “Pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler” Stainback mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah “Sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa.”

Menurut Sapon-Shevin dalam O Neil mengatakan pendidikan inklusi adalah ”sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya”. Dari pendapat Sapon- Shevin perlu ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak. Menurut Suyanto dan Mudjito Pendidikan Inklusi pada hakekatnya adalah ”Bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh peserta didik. Anak/peserta didik berkelainan misalnya, mereka mendapat kesulitan untuk mengikuti beberapa kurikulum yang ada, atau tidak mampu mengakses cara baca tulis secara normal, atau kesulitan mengakses lokasi sekolah, dan sebagainya.”

Pendidikan Inklusi menurut Suyanto dan Mudjito adalah: “Pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa

membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik atau suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, afiliasi politik, bahasa, geografis, tempat tinggal, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental.”

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah sebagai berikut: “Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;

Pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan inklusif;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.”²⁹

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di respon oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 116 tahun 2007 tentang pendidikan inklusi pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak pada umumnya di satuan pendidikan TK/RA dan sekolah/madrasah”.

Di dalam buku Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pendidikan inklusi adalah” pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan.”³¹ Permendiknas ini merupakan kekuatan hukum bagi anak inklusi. Dari segi landasan empiris ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilakukan negara-negara barat sejak tahun 1980. Penelitian berskala besar

dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

Deklarasi Bangkok ini dikenal dengan nama *the Salamanca statement on inclusive education*. Mendefinisikan Pendidikan Inklusi menurut Salamanca Statement adalah:

“Pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi-kondisi lain termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung, dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat.

Dari beberapa pendapat dan beberapa literatur di atas mengenai pendidikan inklusi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua anak, tanpa memandang apakah anak tersebut memiliki kemampuan atau tidak, tanpa adanya diskriminatif jenis kelamin, status sosial, ekonomi, suku, latar belakang budaya, bahasa dan agama mereka semua dapat berada dalam jenjang pendidikan yang sama dengan anak reguler.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman anak yang memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar sehingga kita memandang anak berkebutuhan khusus bukan sebagai masalah tetapi anak berkebutuhan khusus adalah sama seperti anak yang lain yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

BAGIAN 3

PRINSIP-PRINSIP PENTINGNYA PEGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Program pendidikan inklusi perlu peningkatan mutu dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen atau pengelolaan. Manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu dari kata *manus* berarti tangan dan *agere* artinya melakukan, kemudian digabung menjadi *manageree* yang artinya menangani.

Manajemen menurut Stoner dikutip dari buku Hamid Al-Jufri Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Husaini Usman menjelaskan “Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan(P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, Pengawas/evaluasi, dan sistim informasi sekolah/madrasah.” Manajemen sering diartikan sebagai istilah administrasi. Hamid Al-Jufri menjelaskan “manajemen dan administrasi di Indonesia, keduaistilah tersebut bisa diartikan kedudukannya sama sejajar.”

Manajemen Pendidikan atau manajemen sekolah meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sekolah. Manajemen dan kepemimpinan sama pentingnya karena saling melengkapi. Menurut Sharma yang dikutip oleh Husaini Usman manajemen adalah "*Balancing responsibilities between leadership and management is key.*" Bahwa keseimbangan tanggung jawab antara kepemimpinan dan manajemen adalah penting. Sharma juga mendefinisikan manajemen pendidikan adalah suatu bidang studi dan praktek yang menaruh perhatian pada pelaksanaan organisasi pendidikan." Dalam buku Masa Depan Pendidikan Inklusif⁴⁰ Manajemen pendidikan inklusi memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen- komponen pendidikan inklusi yang bersangkutan.

Komponen-komponen dalam pendidikan inklusi terdiri dari: manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, manajemen penilaian, manajemen ketenagaan, manajemen sarana prasarana, manajemen pembiayaan dan manajemen sumber daya manusia

Kepala sekolah sebagai manajer dalam mengelola program pendidikan inklusi didasarkan pada beberapa prinsip yaitu: Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip kebutuhan individual, prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan.

BAGIAN 4

PEDOMAN

PENDIDIKAN INKLUSI

Komponen yang harus disiapkan dalam program pendidikan inklusi mengacu pada standar pendidikan nasional, karena itu pendidikan inklusi berpedoman pada 8 standar pendidikan yaitu:

1. Standar isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan rencana pelayanan individual). RPI disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus.
2. Standar proses yaitu penyesuaian pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, dengan proses belajarnya didampingi guru pendamping khusus.
3. Standar kompetensi lulusan yaitu program pengembangan bakat, program kompensatoris dan pelaksanaan ujian nasional bagi anak berkebutuhan khusus.
4. Standar penilaian yaitu penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) penyesuaian penilaian, dan pemberian surat tanda tamat belajar (STTB) bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menyelesaikan program pendidikan.
5. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan yaitu guru diberikan pelatihan tentang pendidikan inklusi.
6. Standar sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus agar dapat mudah bergerak tanpa hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi.

7. Standar pengelolaan yaitu kebijakan dan laporan perkembangan sekolah oleh kepala sekolah secara sistimatis.
8. Standar pembiayaan, segala yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusi dapat dimasukkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.

BAGIAN 5

KOMPONEN KOMPONEN

PENDIDIKAN INKLUSI

Komponen-komponen tersebut terdiri dari: peserta didik, kurikulum, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah dan pemberdayaan masyarakat.

A. Peserta Didik

Sasaran

Sasaran secara umum adalah peserta didik dalam pendidikan inklusi adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Mereka harus memahami manusia beragam dan berbeda satu dengan lainnya . Secara khusus, sasaran peserta didik dalam pendidikan inklusi adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, tujuannya agar mereka dapat bersosialisasi dan tidak merasa rendah diri terhadap temannya.

Identifikasi Anak Inklusi

Guru harus dapat mengetahui karakteristik peserta didik agar guru dapat mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dengan melakukan *assessment*. *Assesment* dilakukan orang tua, guru, tenaga kependidikan lainnya. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan

pendidikan sesuai kebutuhan dalam program pendidikan inklusi. Identifikasi untuk penjarangan (*screening*), pengalih-tanganan (*referral*), pengklasifikasian, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar.

B. Assesment

Di dalam modul pelatihan pendidikan inklusi, *assessment* adalah “Proses pengumpulan informasi sebelum program pembelajaran disusun.” Fungsi *assessment* untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan belajar anak berkebutuhankhusus. *Assessment* terbagi menjadi dua jenis yaitu: *assessment* fungsional yang dilakukan guru di sekolah adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dan hambatan apa yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut dalam melakukan aktivitas di sekolah. Sasaran *assessment* adalah anak berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah, anak berkebutuhan khusus yang akan bersekolah, anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah/belum bersekolah dan anak berkebutuhan khusus yang akan mengikuti program pendidikan non formal atau informal.

C. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan inklusi adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah reguler, tetapi karena anak berkebutuhan khusus beragam kebutuhan yang mereka miliki, ada yang tingkathambatannya ringan, sedang, dan tinggi, maka kurikulum standar nasionaltersebut harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan tiap anak berkebutuhan khusus. Apabila tingkatan anak tersebut memiliki hambatan yang tinggi maka kurikulum yang digunakan harus diturunkan sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus tersebut.

Modifikasi kurikulum dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, konselor, psikolog dan ahli terkait lainnya. Penyesuaian kurikulum dilaksanakan oleh guru dalam bentuk program pembelajaran individualisasi (PPI).

Kurikulum yang digunakan tiga kurikulum. Pertama kurikulum umum,. Kedua kurikulum model akomodatif, modifikasi yang dilakukan adalah strategipembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada anak berkebutuhan khusus, dan kurikulum yang diindividualisasikan.”⁴⁵

Silabus yang digunakan sama seperti yang digunakan untuk anak regular hanya untuk anak berkebutuhan khusus ditambahkan di kolom ujung kanan. Pengisiannya disesuaikan dengan kondisi apa yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, Misalnya apabila intelegensinya berbeda maka kita melakukan modifikasi isi dengan cara indikatornya diturunkan sampai sesuai dengan integensi anak berkebutuhan khusus tersebut. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, misalnya indikatornya membaca cerita, maka indikator untuk anak berkebutuhan khusus diturunkan menjadi mengeja. Indikator untuk anak tunadaksa tidak hanya memodifikasi isi tetapi memodifikasi strategi. Tempat harus berbeda, metode berbeda, alat juga berbeda. Intinya indikator disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhankhusus. Tersedia program PPI (Program Pembelajaran Individu) untuk menunjang program pendidikan inklusi.

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam program pendidikan inklusi, perlu dibuat terlebih dahulu rancangan pembelajarannya terdiri dari:⁴⁶ Prinsipnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan inklusi sama seperti pada pendidikan regular dengan melakukan perencanaan, dan tetap memberi perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, memberi motivasi terhadap anakdalam kondisi apapun, guru harus mengenal anak secara mendalam, guru harus menggunakan alam sebagai media pembelajaran, hindari mengulang

materi pelajaran, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas, menyiapkan dan menggunakan alat/bahan pelajaran, guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi agar dapat memancing anak terlibat secara langsung baik secara fisik, mental maupun sosial. Guru diharapkan sering mengajukan berbagai problem yang ada di lingkungan sekolah untuk melatih anak merumuskan, mencari data, menganalisa dan memecahkannya sesuai dengan kemampuan, guru harus lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan agar dapat menemukan sesuatu dalam pengamatan, atau penelitian, guru perlu mengenal anak secara individual agar lebih mendalami karakteristik anak.

E. Penilaian dan Sertifikasi

Penilaian dalam program pendidikan inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan.⁴⁷ Penilaian sama seperti penilaian kurikulum berstandar nasional atau model modifikasi. Sekolah yang menggunakan kurikulum umum, maka penilaiannya untuk anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah tersebut. Sekolah yang menggunakan kurikulum modifikasi, maka penilaian untuk anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem penilaian yang dimodifikasi. Sekolah yang menggunakan kurikulum program pembelajaran individualisasi (PPI), maka penilaiannya bersifat individual dan berdasarkan pada kemampuan awal anak berkebutuhan khusus.

Kenaikan kelas anak berkebutuhan khusus jika menggunakan model kurikulum umum maka kenaikan kelas menggunakan pedoman yang berlaku di sekolah yang menggunakan kurikulum yang dimodifikasi maka sistem kenaikan kelas menggunakan model kenaikan kelas yang berdasarkan pada usia kronologis dan atau model kenaikan kelas umum. Sekolah yang menggunakan model kurikulum program pembelajaran individualisasi, maka sistem kenaikan kelas berdasarkan pada usia kronologis kenaikan kelas otomatis.

Anak berkebutuhan khusus yang telah menyelesaikan sekolah dan lulus ujian dengan standar nasional pendidikan mendapat ijazah yang blankonyadikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah di bawah standar nasional pendidikan mendapat surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan anak berkebutuhan khusus tersebut dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi.

Laporan hasil belajar, anak berkebutuhan khusus yang sekolah di reguler, maka model laporan hasil belajarnya menggunakan model rapot umum yang berlaku. Sekolah yang menggunakan kurikulum modifikasi, maka model laporan hasil belajar adalah rapot umum yang dilengkapi dengan deskripsi dan portofolio yang menggambarkan semua kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus selama mengikuti pelajaran di kelasnya. Sedangkan sekolah yang menggunakan model kurikulum program pembelajaran individualisasi, maka laporan hasil belajarnya adalah rapot khusus yang dilengkapi dengan deskripsi dan portofolio, sedangkan nilai kuantitatifnya berdasarkan pada kemampuan dasar awal.

F. Tenaga Pendidik

Menurut modul pelatihan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah “pendidik profesional, mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan yang melaksanakan program pendidikan inklusi.”

Tugas guru kelas adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif agar anak merasa nyaman ketika berada di kelas; menyusun dan melaksanakan *Assessment* untuk mengetahui kemampuan anak dan apa yang dibutuhkan anak; menyusun program pembelajaran dengan kurikulum dan memodifikasinya bersama guru pembimbing khusus; melaksanakan proses belajar mengajar dan melakukan penilaian serta mengadakan *remedial* bagi anak yang harus *remedial*; melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas guru pembimbing khusus menyusun *assessment* pendidikan bersama guru kelas; berkoordinasi dengan guru, pihak sekolah dan orang tua anak berkebutuhan khusus; melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas pelajaran; memberikan bantuan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa *remedial* atau pengayaan; memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi mutasi guru/pergantian guru; memberikan bantuan berupa pengalaman pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus adalah berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Semua peralatan yang dibutuhkan adalah yang peralatan demi untuk kelancaran dan kemudahan ruang gerak bagi anak berkebutuhan khusus.

Sarana yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus contohnya anak yang mengalami kesulitan pendengaran alat yang diperlukan adalah alat *assessment*, alat bantu pendengaran, alat latih bina persepsi bunyi dan irama, alat bantu pembelajaran, alat bantu fisik. Peralatan disesuaikan dengan tingkat gangguan pendengarannya. Untuk anak tunanetra membutuhkan *braille*, *jaws*, gading blok (*Tactile Paving*) seperti ubin yang timbul agar dapat teraba di kaki ketika mereka hendak berjalan menuju kantor, ruang kelas, atau kamar mandi sehingga memudahkan mobilitas mereka, *talking book*, dan CCTV.

Bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan fisik dan motorik membutuhkan *lift*, kamar mandi khusus dan WC khusus bagi anak yang mengalami gangguan disabilitas, adanya ram artinya kursi roda yang dapat mengakses mereka menuju ruangan-ruangan di sekolah. Selain itu di sekolah dibutuhkan ruang sumber seperti ruang bimbingan konseling, tujuannya untuk tempat khusus memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus, karena tidak

menutup kemungkinan bagi anak tunagrahita mengalami kejenuhan belajar atau kondisi fisiknya sedang kurang baik akan mengalami sesuatu yang membutuhkan tempat khusus bagi anak tersebut, buku-buku literatur bagi anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana pada prinsipnya harus tersediasecara maksimal dan dapat bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus demi menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.

G. Manajemen Sekolah

Istilah manajemen sering diartikan hanya sebagai administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada tiga pandangan yang berbeda mengenai arti manajemen. Pertama mengartikan administasi secara luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi, kedua melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen) dan ketiga menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Kesimpulan dari modul pelatihan pendidikan inklusi, “Manajemensama dengan istilah administrasi atau pengelolaan yaitu usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal, material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal”. Pendidikan inklusi memerlukan pengelolaan yang benar-benar maksimal dari mulai manajemen siswa, kurikulum, pembelajaran, penilaian, ketenagaan, sarana-prasarana, sampai kepada pengelolaan biaya dan manajemen sumber daya lingkungan, agar dalam melaksanakan program pendidikan inklusi dapat memberikan hasil yang maksimal.

Manajemen perlu mendapat dukungan dari semua pihak terutama kepala sekolah sebagai *manajer*. Kepala sekolah agar dapat melihat potensi yang dimiliki *stakeholdernya* dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengelola sarana prasarana secara maksimal agar program inklusi dapat terealisasi dengan hasil yang memuaskan. Dalam melaksanakan manajemen, kepala sekolah perlu memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar mereka dapat meningkatkan mutu dalam melaksanakan program pendidikan inklusi. Penghargaan

dapat diberikan dalam bentuk sertifikat, piagam, promosi dana pembinaan, pelatihan atau dalam bentuk lain tergantung kebijaksanaan kepala sekolah sebagai *manajer*.

H. Pemberdayaan Masyarakat

Program Pendidikan inklusi harus dapat merangkul masyarakat dan memberdayakannya agar mau berempati dan bersimpati terhadap program pendidikan inklusi, karena pendidikan inklusi adalah tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Peran perencanaan, penyediaan tenaga ahli/okupasi atau tenaga psikolog, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, pendanaan, pengawasan dan penyaluran lulusan.

Masyarakat dapat kita rangkul dan menjadikan mereka sebagai komite sekolah, dewan pendidikan, forum pemerhati pendidikan inklusi. Peran yang dapat mereka dapat membantu program pendidikan inklusi menyediakan tenaga ahli, membantu dana pendidikan inklusi, menyediakan sarana dan prasarana dengan memberikan sumbangan, membantu menyalurkan kerja, apabila anak berkebutuhan khusus telah menyelesaikan pendidikannya. Mereka dapat membantu sumbang saran dalam mengambil kebijakan, bantuan akses dan jaringan, pengembangan kurikulum, pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusi agar dapat terlaksana secara maksimal.

BAGIAN 6

BEBERAPA PENELITIAN PENDIDIKAN INKLUSI

Beberapa hasil penelitian yang relevansi dengan judul penelitian ini adalah:

Gusti Nono Haryono tahun 2010

Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP. Hasil temuan adalah evaluasi komponen *konteks* menunjukkan *konteks* landasan hukum penyelenggaraan inklusi secara tegas dan jelas belum tertuang dan ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Negara kita. Evaluasi komponen input menunjukkan input anak berkebutuhan khusus yang bersekolah jumlahnya cukup besar dibanding populasi seluruh siswa yang ada. Komponen proses menunjukkan kegiatan perencanaan, proses dan evaluasi, pengajaran untuk setiap aspek dinilai masuk dalam katagori baik dan cukup baik. Evaluasi komponen produk menunjukkan produk perkembangan aspek akademik anak berkebutuhan khusus berdasarkan nilai ujian akhir sekolah dan ujian nasional dinilai cukup menggembirakan.

Persamaannya dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti evaluasi program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, tempat penelitiannya sama jenjangnya yaitu di sekolah dasar. Perbedaannya adalah penelitian yang digunakan Gusti Nono menggunakan model CIPP dan meneliti satu sekolah dasar

sedangkan penulis penelitiannya menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) dan penulis meneliti lima sekolah dasar di tiap wilayah DKI Jakarta.

Jurnal yang ditulis oleh Rianty, Fasli Jalal, Pinta Deniyanti, Yuyun Elizabeth Patras Volume: 1, No.2, dengan Nomor E-ISSN 2550-0406 tentang Evaluasi Program Inklusi Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. Negeri Batu Tulis 2 Kota Bogor. Penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program inklusi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dan menggunakan model evaluasi CIPP. Sumber data berasal dari pakar pendidikan inklusi, Dinas pendidikan, Kepala sekolah, guru, siswa normal, dan siswa berkebutuhan khusus. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Temuan kontek menunjukkan bahwa landasan hukum penyelenggaraan inklusi secara jelas sudah tertuang dan ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Negara kita.

Persamaannya dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti evaluasi program pendidikan inklusi, tempat penelitiannya sama jenjangnya yaitu di sekolah dasar,

Perbedaannya adalah penelitian yang digunakan Rianty, Fasli Jalal², Pinta Deniyanti², Yuyun Elizabeth menggunakan model CIPP sedangkan peneliti melakukan penelitian menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), Penelitian dilakukan di satu sekolah dasar dan penelitian dilakukan bersama temannya sedangkan peneliti melakukan penelitian secara individual dan dilakukan di lima sekolah dasar wilayah DKI Jakarta. Perbedaan lainnya adalah tujuan mereka mengadakan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi program inklusi, tujuan dengan judul sangat berbeda artinya tidak sinkron sedangkan peneliti melakukan penelitian, tujuan dengan judul sangat relevan karena untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi antara program dari standar yang diberikan pemerintah dengan program yang dilaksanakan di satuan pendidikan.

Penelitian oleh Dyah S. “Pengkajian Pendidikan Inklusif bagi anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah” Pengkajian pendidikan inklusif ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah berjalan selama ini. Penelitian menggunakan model CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilihat dinamikanya, seperti tidak tersedianya guru pendamping khusus dan tenaga ahli, belum memiliki sarana dan prasarana khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, atau juga mempunyai sarana tetapi tidak dapat menggunakan sarana yang ada. Di sekolah dasar banyak terjadi kesenjangan antara teori dan pelaksanaan, seperti tidak adanya tuntutan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berprestasi sama dengan siswa reguler.

Pendidikan inklusi diterima dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga pelaksanaannya tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kebijakan. Selain itu, pengadaan dan distribusi buku pedoman belum merata.

Pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan pengelompokan sebagai berikut:

- 1). Model *mainstreaming* (Terpadu Penuh), anak berkebutuhan khusus bersama siswa reguler berada sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama (Tanpa Modifikasi);
- 2). Model Inklusi Penuh, anak berkebutuhan khusus bersama siswa reguler berada sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus;
- 3). Model Inklusi Integrasi Sebagian. Anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler dalam waktu tertentu (bisa dengan dibantu oleh guru pendamping khusus atau tidak, dan bisa ditarik atau belajar di ruang sumber dengan anak berkebutuhan khusus.
- 4) Model Kelompok Kelas Khusus, anak berkebutuhan khusus berada

dikelompok khusus, kelas khusus dengan guru khusus di Sekolah Reguler.

Persamaan dengan penelitian Dyah S adalah sama-sama mengadakan penelitian karena berdasarkan guru pendamping khusus yang belum memenuhi kriteria, sarana dan prasarana, terjadi kesenjangan antara pelaksanaan dengan pedoman yang ada.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Dyah pada jenjang sekolah dasar dan menengah, menggunakan model CIPP sedangkan peneliti dalam melakukan penelitian di Lima Wilayah SD Negeri DKI Jakarta dan menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* (DEM).

Penelitian oleh Wahyudi Hartono pada tahun 2010, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SDN Klampis Ngasem 1/246 Surabaya”. Penelitian yang dilakukan menggunakan Pendekatan *Stake Countenance Model* Upaya evaluasi hasil pendidikan inklusif telah dilaksanakan, namun proses implementasi tidak dievaluasi secara keseluruhan. Hasil implementasi pendidikan inklusif telah dievaluasi secara terpisah dari proses pengajaran dan pembelajaran pada system inklusif. Sehingga masalah yang dihadapi guru bimbingan konseling (BK) dalam mengelola pengajaran dan kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya terungkap. Tujuan penelitian ini mendesain suatu evaluasi pendidikan inklusif yang mampu memberikan informasi untuk manajemen sekolah dan para guru konseling dari segi isi, format cakupan, maupun waktu penyampaian dan bermanfaat bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

Persamaannya adalah tempat mengadakan penelitian sama-sama jenjang sekolah dasar. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Wahyudi Hartono menggunakan pendekatan *Stake Countenance Model*, sedangkan peneliti menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), sedangkan dilihat dari tujuannya penelitian yang dilakukan Wahyudi Hartono adalah mendesain suatu evaluasi pendidikan inklusif yang mampu memberikan informasi untuk manajemen sekolah dan para guru

konseling dari segi isi, format cakupan, maupun waktu penyampaian dan bermanfaat bagi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar, sedangkan peneliti menggunakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi antara program dari standar yang diberikan pemerintah dengan program yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Perbedaan lainnya Wahyudi Hartono melakukan penelitian di satu sekolah dasar, sedangkan penulis melakukan penelitian di Lima Wilayah SD Negeri DKI Jakarta;

Jurnal Internasional yang ditulis oleh Suryadi, Maryadi dan Sugini. Mereka adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta Jurusan Program Pendidikan Khusus. Jurnal yang mereka tulis berjudul “Cara Meningkatkan Sikap, dan Memahami Guru dalam Pendidikan Inklusif ” Kebijakan pendidikan inklusif yang dimulai sebelumnya oleh Unesco ini telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2003. Sebagai kebijakan baru, inklusi akan memerlukan banyak perubahan dalam sistem pendidikan eksklusif yang cenderung bersifat segregatif. Penelitian ini menyelidiki dampak dari lokakarya dalam pendidikan inklusif pada sikap orang tua, kompetensi dan pengetahuan guru.

Subjek penelitian adalah 50 orang tua dan guru dari 25 sekolah dasar dari 25 kecamatan di kabupaten Wonogiri. Mereka mengambil bagian dalam lokakarya dua hari dalam pendidikan inklusif menggunakan mode pembelajaran aktif pengetahuan guru presentasi diukur dengan menggunakan tes tertulis, sementara sikap orang tua dan kompetensi guru diukur menggunakan skala tipelikt.

Hasilnya menunjukkan bahwa: Nilai rata-rata sikap orang tua sebelum lokakarya dan skor rata-rata setelah lokakarya adalah yang berarti bahwa peningkatan skor sangat signifikan; nilai rata-rata kompetensi guru sebelum lokakarya dan skor rata-rata setelah lokakarya menunjukkan kompetensi guru rendah; nilai rata-rata pengetahuan guru sebelum lokakarya adalah 57,60 dan skor rata-rata setelah lokakarya adalah 67,36 keduanya di bawah kriteria penguasaan 70. Test untuk sarana berkorelasi menghasilkan nilai 0,00. Menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan”

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Maryadi dan Sugini adalah sama-sama meneliti jenjang sekolah dasar. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Maryadi dan Sugini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan Suryadi, Maryadi dan Sugini meneliti 25 sekolah dasar, sedangkan peneliti menggunakan Lima SD Negeri DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Maryadi dan Sugini dilakukan oleh tiga peneliti, sedangkan peneliti melakukan penelitian hanya melakukan individual.

BAGIAN 7

PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH

Beberapa Pelaksanaan Pendidikan Inklusi dapat kita amati di beberapa sekolah. Hasil evaluasi program pendidikan inklusi di lima wilayah SD Negeri DKI Jakarta menggunakan *Discrepancy Evaluation Model (DEM) Stage I, II, III dan IV*

DEM Tahap I:

Definisi dan Tujuan Program Pendidikan Inklusi.

Tahap definisi, berfokus pada desain untuk merumuskan tujuan dan proses. Standar yang ingin dicapai merupakan tujuan program yang kemudian menjadi kriteria dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan penetapan *inputs, processes, dan outputs*.

Desain Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusi

Program pendidikan inklusi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program pendidikan untuk semua dan memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah luar biasa agar dapat bersekolah di sekolah umum. Penyelenggaraan Program pendidikan inklusi didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan gubernur terkait). Ketentuan program pendidikan inklusi menjadi penyelenggaraan program inklusi di sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta dengan gambaran yuridis formal, sebagai berikut.

Berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tatanan dan penyelenggaraan baik yang bersifat konstitusional, institusional maupun regulatif yang berfungsi sebagai pelembagaan suatu kebijakan. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sejumlah peraturan menteri terkait tentang pedoman, standar, dan petunjuk pelaksanaan program pendidikan inklusi.

Penyelenggaraan Program Inklusi

Program Pendidikan Inklusi adalah program pemerintah DKI Jakarta yang mewajibkan seluruh sekolah negeri di DKI Jakarta agar menerima anak berkebutuhan khusus dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh hak yang sama di sekolah negeri. Dengan mereka bersekolah di sekolah reguler diharapkan dapat bersosialisasi agar tetap mempunyai rasa optimis, rasa percaya diri dan merasa sama dengan anak lainnya..

Program Pendidikan Inklusi wajib mengikuti standar pendidikan di Indonesia. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program pendidikan inklusi adalah sebagai berikut. Sebagai suatu kebijakan yang mengikat dan harus dilaksanakan, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota.

Penetapan Standar Program Pendidikan Inklusi

Penyelenggaraan program pendidikan inklusi terdiri dari indikator-indikator dikelompokkan ke dalam aspek yang dievaluasi. Aspek yang dievaluasi tersebut merupakan *standard Discrepancy Evaluation Model (DEM)* dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi.

Tabel 13**Komponen Standar Program Pendidikan Inklusi**

No	Komponen Standar Program Pendidikan Inklusi	Indikator Standar Program Pendidikan Inklusi
1	Standar isi	1. Desain Program Pendidikan Inklusi 2. Tujuan Program Pendidikan Inklusi 3. Perangkat Pengajaran 4. Silabus yang indikatornya diturunkan 5. Kurikulum Modifikasi 6. PPI (Program Pembelajaran Individual) 7. Assesmen
2	Standar Proses	1. Ketersediaan Instrumen 2. Teknik/cara mengetahui jenis hambatan anak berkebutuhan khusus 3. PPDB 4. Tahapan Pelaksanaan desain program Pendidikan Inklusi.
3	Standar Penilaian	1. Cara guru membuat PPI 2. KKM 3. Teknik Pemisahan soal untuk anak berkebutuhan khusus 4. Model Rapor
4	Standar Kompetensi Lulusan	1. Kenaikan anak berkebutuhan khusus 2. Kelulusan anak berkebutuhan khusus
5	Standar Kompetensi Guru dan Pendidik	1. Kualifikasi tenaga pendidik 2. Pelatihan bagi guru pendidikan khusus 3. Pelatihan bagi guru kelas

6	Standar Sarana Prasarana	1. Buku penunjang 2. Setting tempat duduk anak berkebutuhan khusus 3. Alat peraga untuk merangsang syaraf 4. Akses bagi anak berkebutuhan khusus 5. Motorik anak berkebutuhan khusus 6. Alat terapis
7	Standar Pengelolaan	1. Kerjasama dengan pihak terkait 2. Kerjasama dengan masyarakat 3. Daya dukung 4. Keterlibatan tenaga okupasi, dokter tenaga ahli/tenaga terapis lainnya
8	Standar Pembiayaan	1. Anggaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus 2. Pelatihan 3. Koordinator guru inklusi

Komponen standar program pendidikan inklusi di atas secara umum meliputi: 1). Standar isi; 2). Standar proses; 3). Standar penilaian; 4). Standar kelulusan; 5). Standar kompetensi guru; 6). Standar sarana prasarana; 8). Standar pembiayaan.

Penetapan Input Process-Output Diagram

Diagram *input-process-output* merupakan interpretasi dan identifikasi variabel yang telah dilakukan sebelumnya secara lebih sistematis. Diagram digunakan sebagai investigasi variabel yang akan digunakan dalam skenario program, serta variabel yang akan menjadi indikator pemenuhan kinerja program pendidikan inklusi.

Input tak terkendali merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja program pendidikan inklusi, namun sistem tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol nilai. *Input* tak terkendali umumnya merupakan variabel eksternal sistem yang diamati, seperti kompetensi *decision maker*. Sedangkan *input* terkendali merupakan variabel yang dapat

dikontrol oleh sistem agar dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan. *Input* terkendali pada umumnya merupakan variabel-variabel yang berasal dari internal sistem. Beberapa variabel yang termasuk dalam input terkendali, diantaranya Pengadaan sarana prasarana, Menyediakan guru pembimbing khusus, Mengikuti diklat pendidikan inklusi, membuat silabus, kurikulum modifikasi, dan membuat perangkat pengajaran.

Lingkungan merupakan faktor di sekitar sistem yang dapat memberikan pengaruh terhadap sistem, dalam konteks ini adalah program diklat inklusi. *Input* tak terkendali, *input* terkendali, dan lingkungan akan menghasilkan *output* dikehendaki dan *output* tak dikehendaki. *Output* dikehendaki dapat berupa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sejumlah input yang mempengaruhi, misalnya peningkatan sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus, kinerja guru pembimbing khusus, kinerja guru kelas, ketersediaan silabus, kurikulum modifikasi, pembuatan perangkat pengajaran, ketersediaan assessmen, dan pembuatan PPI. Sedangkan *output* tak dikehendaki merupakan efek samping yang tidak dapat dihindari, namun dapat menjadi informasi atau masukan untuk mengontrol nilai *input* terkendali, seperti terbatasnya sarana prasarana, rendahnya kinerja guru pembimbing khusus, rendahnya kinerja guru kelas, tidak tersedia silabus, kurikulum modifikasi, dan perangkat pengajaran, serta pembelajaran belum optimal

Causal Loop

Untuk memudahkan pembahasan bagian selanjutnya, data di atas kemudian disimulasikan dalam bentuk *Causal Loop Diagram (CLD)* yang digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pemodelan evaluasi program pendidikan. Metodologi sistem dinamis berhubungan dengan variabel-variabel yang bertendensi dinamis tentang variabel program pendidikan inklusi yang kompleks dan saling berinteraksi seiring bertambahnya waktu. Penggunaan CLD dalam penyajian data penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena dinamis pembuatan keputusan yang saling berinteraksi dan dominan dari sistem program pendidikan inklusi.

CLD dibuat untuk menunjukkan komponen utama yang berpengaruh pada penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Dalam *causal loop diagram* pula akan ditunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel program pendidikan inklusi yang digambarkan dengan anak panah. Anak panah yang bertanda positif menunjukkan penambahan nilai pada variabel tersebut akan menyebabkan penambahan nilai pada variabel yang dipengaruhi. Model CLD perlu diverifikasi sesuai dengan tahapan untuk memastikan apakah model yang dibuat sesuai dengan persepsi dengan melakukan *check model*, proses verifikasi juga dilakukan dengan pengecekan unit atau satuan variabel yang terdapat di unkit dengan melakukan *unit check* pada *software Vensim*. Dari hasil pengecekan terhadap model, didapatkan bahwa model dan unit satuan keseluruhan variabel dapat diterima. Sedangkan proses validasi dilakukan dengan metode *white box* yaitu proses klarifikasi model yang telah dibuat dengan *experts* (para pakar).

BAB 8

DESAIN SKENARIO

PROGRAM PENDIDIKAN

INKLUSI

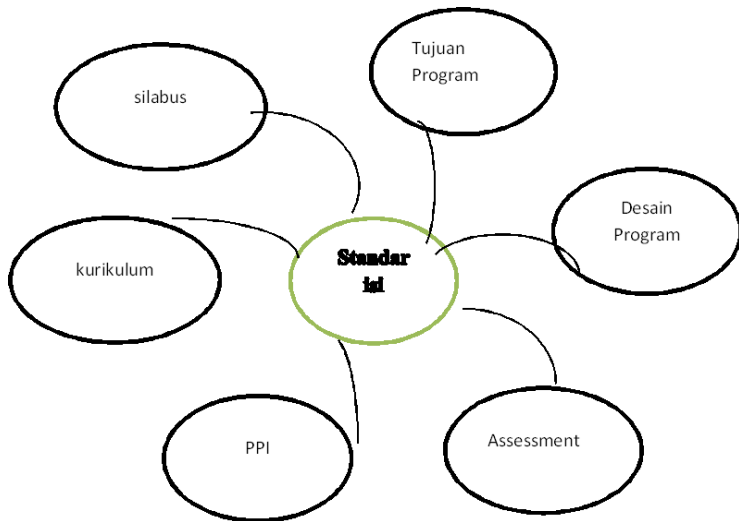
Penyusunan skenario upaya peningkatan program pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan cara mengubah nilai pada variabel yang berpengaruh terhadap sistem dan memberikan perbaikan sebagaimana tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini ada beberapa bentuk skenario sub model program, yaitu:

- 1) Sub model standar isi.
- 2) Sub model standar proses
- 3) Sub Model Standar Penilaian.
- 4) Sub model standar kelulusan.
- 5) Sub model kompetensi guru.
- 6) Sub model sarana dan prasarana.
- 7) Sub model standar pengelolaan.
- 8) Sub model pembiayaan.

1. Sub Model Standar Isi

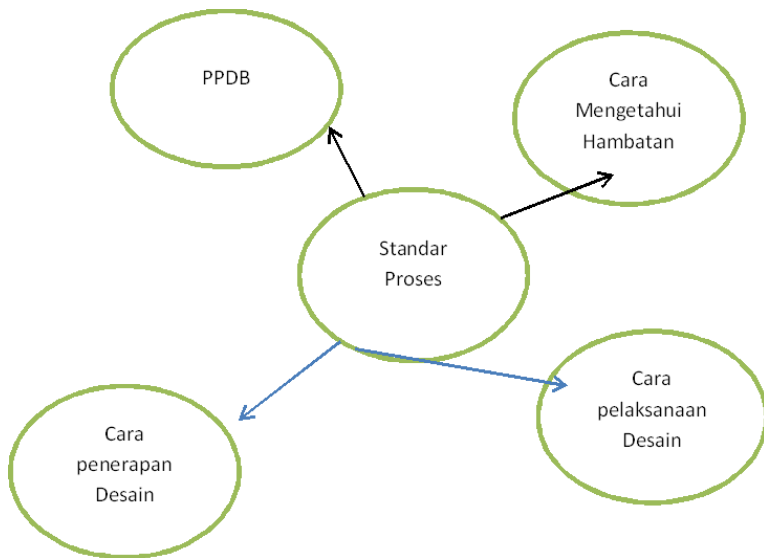
Skenario dilakukan dengan meningkatkan kondisi kecukupan ketersediaan fasilitas program pendidikan inklusi, yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat desain program pendidikan inklusi, ketersediaan tujuan program, ketersediaan silabus untuk anak berkebutuhan khusus, ketersediaan kurikulum yang dimodifikasi, pembuatan PPI, pembuatan *assessment*.



Gambar 11: Sub Model Standar Isi

2. Sub Model Standar Proses

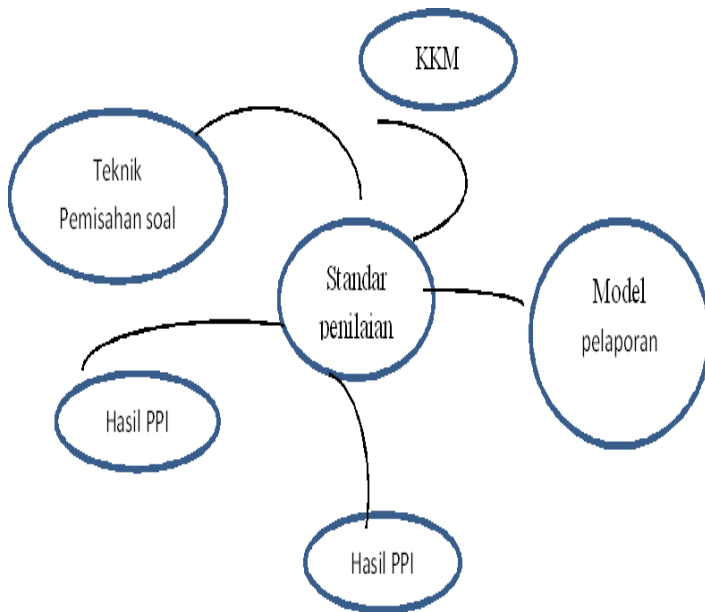
Sub model standar proses pada penyelenggaraan program inklusi, skenario dalam hal bagaimana cara guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, cara mengetahui hambatan anak berkebutuhan khusus, cara PPDB bagi anak berkebutuhan khusus, cara pelaksanaan dan penerapan desain program bagi anak berkebutuhan khusus,



Gambar 12: Sub Model Standar Proses

3. Sub Model Standar Penilaian

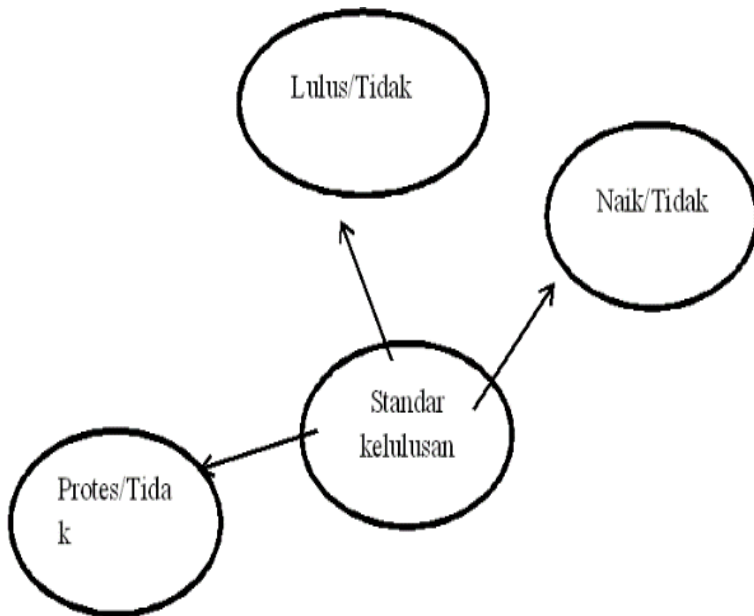
Pada sub model ini skenarionya adalah pada penyelenggaraan penilaian yang berisi: cara guru memisahkan soal ulangan untuk anak berkebutuhan khusus, model pelaporan, KKM, hasil PPI dan model pelaporan hasil belajar anak berkebutuhan khusus,



Gambar 13: Sub Model Standar Penilaian

4. Sub Model Standar Kelulusan

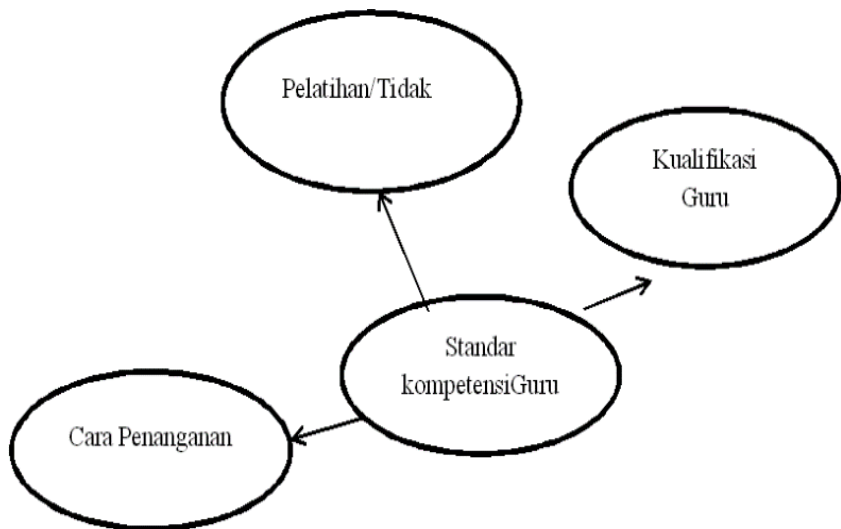
Sub model standar kelulusan pada program pendidikan inklusi adalah mengenai kelulusan anak berkebutuhan khusus atau kenaikan pada jenjang berikutnya, menuai protes atau tidak bagi orang tua murid atau masyarakat sekitar,



Gambar 14 : Sub Model Standar kelulusan

5. Sub Model Standar Kompetensi Guru

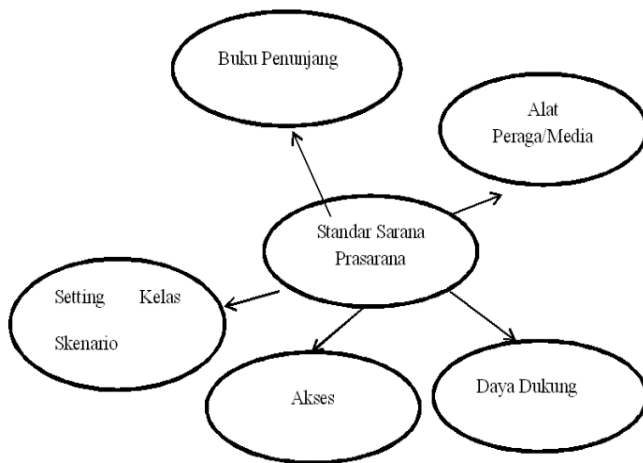
Sub model kualifikasi dan kompetensi guru ini merupakan model yang dideskripsikan sebagaimana kriteria kualifikasi dan kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dalam kategori ini, terdapat tiga komponen utama, yaitu pendidikan formal, kompetensi guru, cara penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus. Variabel pendidikan formal yaitu kesesuaian pendidikan formal guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Variabel kompetensi guru adalah jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan bagi anak berkebutuhan khusus atau guru yang berkualifikasi dari pendidikan luar biasa). relevansi dengan Program pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah DKI Jakarta



Gambar 15: Sub Komponen Kompetensi Guru

6. Sub Model Standar Sarana Prasarana

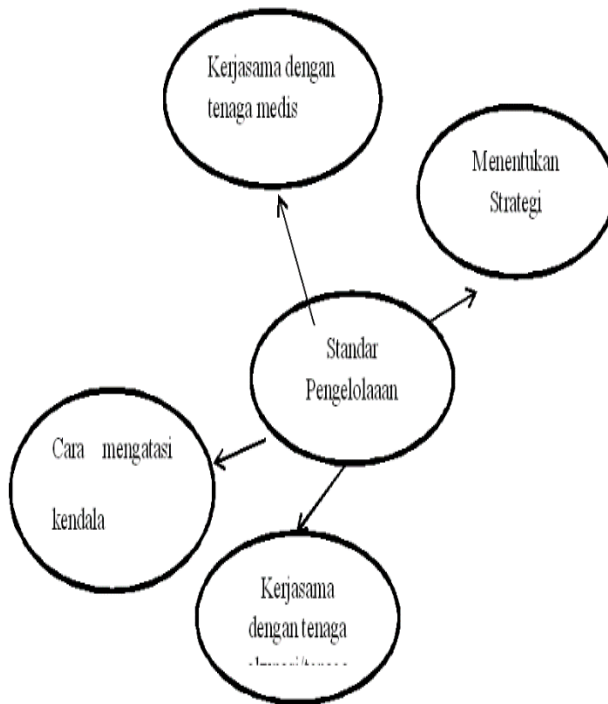
Skenario dilakukan dengan meningkatkan kondisi kecukupan ketersediaan fasilitas sarana prasarana, mengadakan ketersediaan tenaga *okupasi* terapi, tenaga medis, Psikolog, *setting* kelas, agar dapat mencapai penyelenggaraan program pendidikan inklusi. dilakukan dengan membelikan alat peraga atau media bermain yang dapat merangsang perkembangan syaraf motorik, dapat juga membelikan buku penunjang proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus..



Gambar 16: Standar Sarana Prasarana

7. Sub Model Standar Pengelolaan

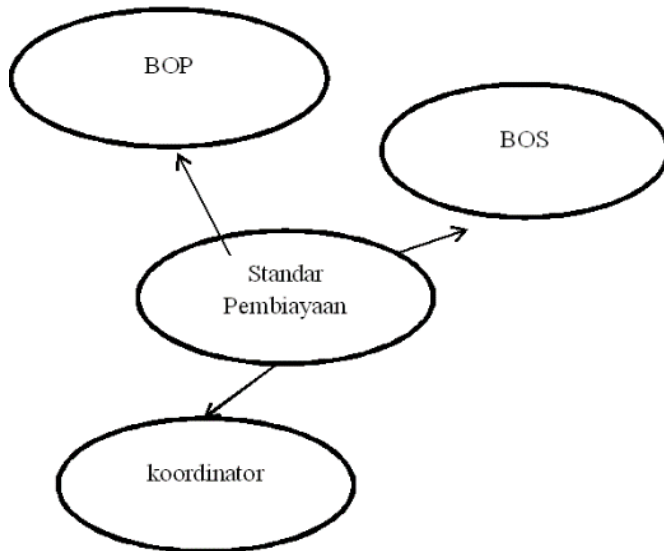
Skenario pada sub model ini adalah: Bagaimana pihak sekolah melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, tenaga kesehatan/rumah sakit, dan menentukan strategi penyelenggaraan program pendidikan inklusi.



Gambar 17 : Sub Model Standar Pengelolaan

8. Sub Model Standar Pembiayaan

Sub model standar pembiayaan pada program pendidikan inklusi masuk pada rencana kegiatan anggaran sekolah atau tidak, Jika masuk dalam RKAS dana yang didapatkan dari dana Bos atau BOP dan siapa yang mengelola, untuk itu disiapkan koordinator yang menjadi penyambung lidah yang dibutuhkan guru kelas atau pembimbing khusus.



Gambar 18: Sub Model Standar pembiayaan

DEM Tahap II:

Instalasi/Daya Dukung Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusi

Pada tahap *instalasi*, rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. Untuk tujuan identifikasi kesenjangan antara instalasi program dengan standar, maka dikembangkan sejumlah instrumen.

Boundary Chart Faktor Berpengaruh

Secara umum, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Sementara variabel yang terlibat dan hubungan nyata antara elemen terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan inklusi dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Pada tahap selanjutnya, dilakukan konseptualisasi model yang bertujuan untuk menunjukkan gambaran daya dukung instalasi sistem dinamis yang akan dilakukan.

Untuk lebih memfokuskan pada analisis instalasi/daya dukung, maka dilakukan pembatasan variabel yang termasuk dalam model. Pembatasan model bertujuan agar model memiliki cakupan analisis yang lebih detail dan komprehensif, sehingga model tidak melebar dari batasan sistem yang diteliti. Konseptualisasi model terdiri atas pembatasan model, penyusunan diagram model *boundary chart*, *input-output*, penyusunan *causal loop diagram*, dan penyusunan *stock and flow diagram*. Pembatasan model, secara umum digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14**Bounday Chart Faktor Berpengaruh**

Exogenous	Endogenous	Excluded
Kondisi ketersediaan Standar Isi	Penyelenggaraa Program Pendidikan Inklusi	
Kondisi Standar Proses		
KondisiStanfar Penilaian		
Kondisi Standar kelulusan		
Kondisi Kompetensi Guru		
Kondisi Sarana Prasarana		
Kondisi Standar Pengelolaan		
Kondisi Standar Pembiayaan		

Rekapitulasi Faktor Berpengaruh Ketercapaian Program Pendidikan Inklusi

Data faktor-faktor penghambat ketercapaian program Pendidikan Inklusi

1. SDN Kapuk Muara 03 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Penyelenggaraan Program Inklusi SDN kapuk Muara 03

No.	Komponen Penilaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Ketimpangan	Ketercapaian Kriteria
1	Standar isi	22,8%	77,8%	kurang baik
2	Standar Proses	16,7%	83,3%	kurang baik
3	Standar Penilaian	22,5%	87,5%	Kurang Baik
4	Standar Kompetensi Lulusan	33,3%	66,7%	Cukup Baik
5	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	50%	50%	Baik
6	Standar Sarana Prasarana	63,6%	36,4%	Cukup Baik
7	Standar Pengelolaan	36,4%	63,6%	Kurang Baik
8	Standar Pembiayaan	0,1%	90,9%	Kurang Baik Baik
Rata-rata		30,47%	69,53%	Kurang Baik

Berdasarkan tabel di atas: menunjukkan bahwa program inklusi, berdasarkan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusi di SDN Kapuk Muara 03 sebesar 30,47% termasuk kategori sangat kurang baik. Tingkat kesenjangan dari indikator mencapai 69,53%. Tingkat pelayanan tertinggi pada standar kompetensi kelulusan mencapai 100% tidak ada ketimpangan. Kriteria standar pelayanan terendah pada standar pembiayaan dengan tingkat ketimpangan tertinggi mencapai 90,9%.

2. SDN Cengkareng Barat 03 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Penyelenggaraan Program Inklusi SDN Cengkareng Barat 03 Pagi

No.	Komponen Penilaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Ketimpangan	Ketercapaian Kriteria
1.	Standar isi	20,5%	79,5%	kurang Baik
2.	Standar Proses	18,7%	82,3%	kurang Baik
3	Standar Penilaian	16,4%	83,6%	Kurang Baik
4.	Standar Kompetensi Lulusan	100%	0%	Sangat Baik
5.	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	0%	100%	Kurang Baik
6	Standar Sarana Prasarana	13 %	87%	Kurang Baik
7	Standar Pengelolaan	34,4%	65,6%	Kurang Baik
8.	Standar Pembiayaan	0,1%	90,9%	Kurang Baik
Rata-rata		16,2%	43,8%	Kurang Baik

Penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusi SDN Cengkareng Barat 03 Pagi, Tingkat kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusi paling tinggi berdasarkan komponen penilaian standar sarana prasarana mencapai 13% dengan tingkat ketimpangan 87%. Kriteria standar pelayanan terendah pada standar pembiayaan dengan tingkat ketimpangan tertinggi mencapai 90,9%.

DEM Tahap III:

Proses Pengukuran Program Pendidikan Inklusi

Pada tahap proses, evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana mendapatkan data tentang ketercapaian program pendidikan inklusi. Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan program pendidikan inklusi standar dari pemerintah dengan penyelenggaraan di lapangan apakah penyelenggaraan berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi.

Hasil Pengukuran Program Pendidikan inklusi.

Untuk mengetahui hasil penyelenggaraan program tersebut, peneliti menyusun serangkaian instrumen untuk menjaring data baik kuantitatif maupun kualitatif.

Data-data SDN Kapuk Muara 03 mencakup 8 standar pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusi SDN Kapuk Muara 03 ,berdasarkan komponen penilaian terlihat bahwa seluruh perbandingan tingkat pencapaian dengan tingkat ketimpangan lebih besar tingkat ketimpangan. data pencapaian kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusi paling tinggi berdasarkan komponen penilaian standar sarana prasaranamencapai 63,6% dengan tingkat ketimpangan 36,4%. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Program pendidikan inklusi di SDN Kapuk Muara 03 terdiri dari 8 standar adalah sebagai berikut :

1. Standar Isi.

SDN Kapuk Muara 03 tingkat ketercapaian untuk standar isi baru mencapai 22,2% dengan tingkat ketimpangan 77,8%. Data tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi. SDN kapuk Muara belum membuat desain program pendidikan inklusi ketimpangan sebesar 55,6%; belum memiliki silabus yang indikatornya diturunkan 77,8%,

sekolah belum memiliki kurikulum yang dimodifikasi 88,9%, tidak membuat RPP yang indikatornya diturunkan, 33,3% tidak membuat instrumen 66,7%,

2. Standar Proses

SDN Kapuk Muara 03 tingkat ketercapaiannya 16,7% terdapat ketimpangan dalam standar proses sebesar 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk komponen standar proses kurang baik. Data tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi, SDN Kapuk Muara 03 tidak melakukan penerapan RPP modifikasi yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar, Guru dalam proses mengatasi dan mengetahui hambatan pada anak berkebutuhan khusus belum melakukan secara optimal tingkat ketercapaiannya 66,7% terdapat ketimpangan sebesar 33,3%, Guru menerapkan program pendidikan inklusi tingkat ketercapaiannya sebesar 16,7% sehingga terdapat ketimpangan sebesar 83,3%. Dalam Penyelenggaraan program inklusi untuk pembuatan assessmen, tingkat ketercapaiannya 33,3% dengan ketimpangan mencapai 66,7%. Tingkat ketercapaian tertinggi adalah 100% pada PPDB sekolah telah melaksanakan proses PPDB secara benar melalui PPDB *online*, sehingga tidak ada ketimpangan dalam PPDB.

3. Standar Penilaian

SDN Kapuk Muara 03 tingkat ketercapaian dalam standar penilaian mencapai 12,5% dengan tingkat ketimpangan sebesar 87,5%. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara untuk standar penilaian di SDN Kapuk Muara 03 guru membuat penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus tingkat ketercapaiannya adalah 37,5% dengan ketimpangan mencapai 62,5%. SDN Kapuk Muara ketika memberikan soal ulangan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak semua memisahkan jenis ulangannya sehingga ketercapaian untuk penilaian standar minimumnya mencapai 50% kategori cukup dengan ketimpangan mencapai 50%. Sekolah tidak membuat PPI sehingga ketercapaiannya hanya 25 % dengan ketimpangan 75% . Model pelaporan tingkat ketercapaiannya adalah: 100% dan tingkat kelulusan 100% tidak ada ketimpangan, Pihak sekolah selalu dapat mengatasi

kendala dalam program pendidikan inklusi karena selalu mengadakan musyawarah/*sharing* dengan *stakeholder* yang ada sehingga tingkat ketercapaiannya mencapai 100% tidak ada ketimpangan

4. Standar Kompetensi Kelulusan

SDN kapuk Muara 03 mengenai standar kompetensi kelulusan tingkat ketercapaiannya 66,7% dengan ketimpangan 33,3%. Mengenai jenjang kelulusan/kenaikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Kapuk Muara 03 mencapai 100% tidak ada ketimpangan, sedangkan mengenai bentuk pelaporan tingkat ketercapaian mencapai 83,3% dengan ketimpangan 16,7%.

5. Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

SDN Kapuk Muara 03 tingkat ketercapaian kompetensi guru 50% denganketimpangan 50% Karena tidak semua guru pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi. sebagian guru pernah megikuti pelatihan yang diadakan dinas pendidikan.

6. Standar Sarana Prasarana

SDN Kapuk Muara 03 pada komponen standar sarana prasarana tingkat ketercapaian mencapai 63,6% terdapat ketimpangan sebesar 26,4% karena masih belum adanya buku penunjang bagi anak berkebutuhan khusus.

7. Standar Pengelolaan

SDN Kapuk Muara 03 pada standar pengelolaan tingkat ketercapaiannya adalah sebesar 36,4% dengan ketimpangan sebesar 63,7%. Guru seharusnya mengelola RPP, silabus dan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus tetapi tidak melakukannya. Mengenai strategi dalam pengajaran tingkat ketercapaiannya sebesar 45,1% dengan tingkat ketimpangan sebesar 54,9%. SDN Kapuk Muara 03 tidak memiliki tenaga ahli, dokter atau tenaga okupasi sehingga tingkat ketimpangan tertinggi mencapai 100%.

8. Standar Pembiayaan

SDN kapuk Muara 03 Pada standar pembiayaan tingkat ketercapaian adalah sebesar 0,1% dengan ketimpangan sebesar 90,9% artinya adalah SDN kapik muara03 tidak pernah mencantumkan anggaran untuk anak berkebutuhan khusus.

DEM Tahap IV:

Perbandingan Hasil Capaian Program Pendidikan Inklusi

Selama tahap produk, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuanakhir program tercapai atau tidak. Provus membedakan antara dampak terminal (*immediate outcomes*) dan dampak jangka panjang (*long-term outcomes*). Berdasarkan pemikiran tersebut, mendorong peneliti untuk tidak hanya mengevaluasi hasil berupa kinerja program, tetapi lebih dari itu perlu melakukan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi.

Hasil Capaian Program Pendidikan Inklusi

Hasil capaian (*performance*) program pendidikan inklusi mencakup komponen dukungan 8 standar pendidikan.

Tingkat ketercapaian program pendidikan inklusi di SDN kapuk Muara 03 adalah sebagai berikut: Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Kapuk Muara 03 termasuk kategori kurang baik tingkat ketimpangan terletak pada tidak adanya silabus yang dibuat khusus dan tidak adanya kurikulum, dan tidak adanya guru membuat *assessment* yang berguna unttuk menindak lanjuti solusi bagi anak berkebutuhan khusus. Guru juga tidak membuat PPI yang berguna untuk memantau kemajuan anak berkebutuhankhusus. Hasilnya adalah SDN kapuk Muara 03 tidak memiliki dokumen silabus yang khusus, tidak memiliki kurikulum yang dimodifikasi, tidak memiliki dokumen PPI (Program Pembelajaran Individu) karena baik guru pembimbing khusus dan gurukelas tidak membuat dokumen tersebut, sehingga yang tidak terlaksana Program pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar program.

Dari komponen standar isi pencapaian jauh dari standar program pendidikan inklusi yang ada. Komponenstandar kelulusan sangat tinggi tidak terdapat ketimpangan karena anak berkebutuhankhusus harus lulus dengan syarat soal dibuat guru sesuai dengan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus harus naik ke jenjang kelas berikutnya. Mengenai kompetensi penilaian terdapat ketimpangan yaitu guru menggunakan penilaian yang belum sesuai dengan prosedural sebelum melakukan penialain guru harus

menyesuaikan indikator terlebih dahulu kemudian merendahkan indikator tersebut, pada kenyataannya terdapat ketimpangan, guru memberikan penilaian jika anak rajin dan mau menulis materi yang ada di buku paket tanpa memperhatikan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus yang penting anak tidak mengganggu temannya. anak berkebutuhan khusus penilaian harus disusun.

Komponen standar proses penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SDN kapuk Muara 03 sudah sesuai dengan standar, guru dalam penerimaan PPDB mengikuti aturan yang ada yaitu melalui PPDB *online* dan orang tua diminta membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menerangkan tentang hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.

Komponen standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan 100%, guru-guru yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus tidak ada satu guru yang berkualifikasi pendidikan khusus. Guru-guru di SDN kapuk Muara 03 hanya mendapatkan pelatihan satu kali dan hanya satu orang guru sejak tahun 2015, hingga saat ini tidak ada pelatihan lagi yang diadakan dari Dinas Pendidikan maupun dari pihak terkait lainnya.

Penunjukkan guru pendamping khusus berdasarkan guru yang pernah ikut pelatihan pendidikan inklusi, karena tidak adanya guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa. Untuk guru yang ada anak inklusi di kelas anak diberi tugas menulis tidak disesuaikan dengan materi yang diberikan guru terhadap anak normal di kelas itu, dengan kata lain guru hanya menangani anak sekedar saja tidak mengikuti standar yang ada dalam penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Tujuan agar anak mau datang ke sekolah dan bisa diam tidak mengganggu anak normal lainnya. Komponen sarana prasarana di SDN kapuk Muara 03 adalah bahwa sarana prasarana yang digunakan anak berkebutuhan khusus sama seperti yang digunakan anak pada umumnya dan di SDN kapuk Muara 03 tidak tersedia tenaga profesional, dokter, psikolog atau tenaga okupasi, sedangkan daya dukung lingkungan dan orang tua dalam mendukung program inklusi Sangat mendukung karena tidak ada orang tua yang protes di sekolah ini ada anak berkebutuhan khusus.

Mengenai standar kelulusan di SDN Kapuk Muara 03 sudah mengikuti kriteria standar program pendidikan inklusi karena terlihat dari hasil yang didapat sekolah dalam hal kelulusan anak berkebutuhan khusus harus lulus dan dalam standar pengelolaannya menggunakan cara ketika pelaksanaan ujian anak tersebut tidak mengikuti ujian standar tetapi diberikan soal berbeda dari anak normal. Soal yang diberikan dibuat langsung oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelasnya dan sebelumnya dikonsultasikan kepada kepala sekolah beserta guru lainnya. Mengenai komponen standar pembiayaan terlihat ada ketimpangan karena tidak adanya dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dana pembiayaan anak berkebutuhan khusus sebaiknya dapat disusun pada RKAS karena terdapat anak berkebutuhan khusus maka harus ada sarana atau alat yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan program pendidikan inklusi misalnya dibelikan buku penunjang penyelenggaraan program inklusi yang peneliti lihat tidak adanya buku penunjang di SDN Kapuk Muara 03.

Dari hasil tersebut peneliti menggambarkan tingkat ketercapaian program pendidikan inklusi di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi adalah sebagai berikut: Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi termasuk kategori kurang baik tingkat ketimpangan terletak pada tidak adanya silabus yang dibuat khusus dan tidak adanya kurikulum, dan tidak adanya guru membuat *assessment* yang berguna untuk menindak lanjuti solusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Guru juga tidak membuat PPI (Program Pembelajaran Individu) yang berguna untuk memantau kemajuan anak berkebutuhan khusus. Hasilnya adalah SDN Cengkareng Barat 03 Pagi tidak memiliki dokumen silabus yang khusus, tidak memiliki kurikulum yang dimodifikasi, tidak memiliki dokumen PPI (Program Pembelajaran Individu) karena baik kepala sekolah dan guru kelastidak mengetahui tentang kurikulum modifikasi, dan PPI sehingga guru tidak membuat dokumen tersebut.

Hal ini berdampak pada tidak terlaksana Program pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar program. Dari komponen standar isi pencapaian jauh dari standar program pendidikan inklusi yang ada.

Komponen standar kelulusan sangat bagus tidak terdapat ketimpangan karena anak berkebutuhankhusus, mereka harus lulus dengan syarat soal dibuat sudin sesuai dengan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus harus naik ke jenjang kelas berikutnya. Mengenai kompetensi penilaian terdapat ketimpangan yaitu guru menggunakan penilaian yang belum sesuai dengan prosedural dimana sebelum melakukan penilaian guru harus menyesuaikan indikator terlebih dahulu kemudian merendahkan indikator tersebut, pada kenyataannya terdapat ketimpangan guru memberikan penilaian yang diturunkan bukan indikator tetapi KKMnya yang dibedakan dengan anak normal.

Jika KKM anak normal 70 maka anak berkebutuhankhusus bisa di bawahnya bahkan mencapai 20 dan anak berkebutuhan khusus disuruh mencatat yang penting anak tidak mengganggu temannya. Komponen standar proses penyelenggaraan program pendidikan di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi sudah sesuai dengan standar, guru dalam penerimaan PPDB mengikuti aturan yang ada yaitu melalui PPDB *online* dan orang tua diminta membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menerangkan tentang hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.

Komponen standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan 100%, guru-guru yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus tidak ada satu guru yang berkualifikasi pendidikan khusus. Guru-guru di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi tidak ada dan tidak pernah mengikuti pelatihan program pendidikan inklusi Tujuan agar anak mau datang ke sekolah dan bisa diam tidak mengganggu anak normal lainnya. Komponen sarana prasarana di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi adalah bahwa sarana prasarana yang digunakan anak berkebutuhan khusus sama seperti yang digunakan anak pada umumnya dan di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi tidak tersedia tenaga profesional, dokter, psikolog atau tenaga okupasi, sedangkan daya dukung lingkungan dan orang tua dalam mendukung program inklusi sangat mendukung karena tidak ada orang tua yang protes di SDN Cengkareng Barat 03Pagi ada anak berkebutuhan khusus.

Mengenai standar kelulusan di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi sudah mengikuti kriteria standar program pendidikan inklusi karena terlihat dari hasil yang didapat sekolah dalam hal kelulusan anak berkebutuhan khusus harus lulus dan dalam standar pengelolaannya menggunakan cara ketika pelaksanaan ujian anak tersebut tidak mengikuti ujian standar tetapi diberikan soal berbeda dari anak normal. Soal yang diberikan dibuat oleh sudin pendidikan berdasarkan laporan dari kepala sekolah jenis hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.

Mengenai komponen standar pembiayaan terlihat ada ketimpangan karena tidak adanya dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus dimana dana pembiayaan anak berkebutuhan khusus sebaiknya dapat disusun pada RKAS karena terdapat anak berkebutuhan khusus maka harus ada sarana atau alat yang dapat merangsang anak berkebutuhan khusus agar mau belajar demi kelancaran penyelenggaraan program pendidikan inklusi dan dibelikan buku penunjang pelaksanaan program inklusi yang peneliti lihat tidak adanya buku penunjang dan alat *stimulus* di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi.

Dari hasil tersebut peneliti menggambarkan tingkat ketercapaian program pendidikan inklusi di SDN Pengadegan 07 Pagi adalah sebagai berikut: Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Pengadegan 07 Pagi termasuk kategori cukup baik tingkat ketimpangan terletak pada sekolah tidak membuat perangkat yang lebih khusus karena anak berkebutuhan khususnya hanya keterlambatan menerima pelajaran, hanya materi lebih dimudahkan, tidak tersedia kurikulum yang dimodifikasi, hanya menyesuaikan dengan keterbelakangannya dan keadaannya masing-masing. Tidak membuat *assessment* dan tidak membuat PPI (Program Pembelajaran Individu) hanya tiap individu ada catatannya di buku khusus dan dengan tidak adanya guru membuat *assessment* yang berguna untuk menindak lanjuti solusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Guru juga tidak membuat PPI yang berguna untuk memantau kemajuan anak berkebutuhan khusus. Hasilnya adalah SDN Pengadegan 07 Pagi tidak memiliki dokumen silabus yang khusus, tidak memiliki kurikulum yang dimodifikasi, tidak memiliki dokumen PPI

(Program Pembelajaran Individu) karena baik guru pembimbing khusus dan guru kelas tidak membuat dokumen tersebut, sehingga yang tidak terlaksana program pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar program. Dari komponen standar isi pencapaian jauh dari standar program pendidikan inklusi yang ada. Komponen standar kelulusan sangat tinggi tidak terdapat ketimpangan karena anak berkebutuhan khusus harus lulus dengan syarat soal dibuat guru sesuai dengan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus harus naik ke jenjang kelas berikutnya.

Mengenai kompetensi penilaian terdapat ketimpangan yaitu guru menggunakan penilaian yang belum sesuai dengan prosedural dimana sebelum melakukan penilaian guru harus menyesuaikan indikator terlebih dahulu kemudian merendahkan indikator tersebut, pada kenyataannya terdapat ketimpangan, guru memberikan penilaian masih ada yang memberikan di bawah KKM padahal kepala sekolah telah memberikan informasi bahwa pemberian penilaian dengan cara anak berkebutuhan khusus disamakan dengan yang lain rapotnya hanya sekolah menjelaskan 70 anak berkebutuhan khusus berbeda dengan 70 anak reguler, sesuai dengan yang didapat anak berkebutuhan khusus dengan model pelaporan yang sama dengan anak reguler.

Komponen standar proses penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SDN Pengadegan 07 Pagi sudah sesuai dengan standar, guru dalam penerimaan PPDB mengikuti aturan yang ada yaitu melalui PPDB *online* dan orang tua diminta membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menerangkan tentang hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Komponen standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan 100%, guru-guru yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus tidak ada satu guru yang berkualifikasi pendidikan khusus.

Guru-guru di SDN Pengadegan 07 Pagi hanya mendapatkan pelatihan satu kali satu tahun dengan lamanya pelatihan hanya 3 hari dan waktu yang singkat tidak dapat menyerap ilmu yang diberikan bagi guru tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan program pendidikan inklusi dengan optimal. Penunjukkan guru pendamping khusus berdasarkan guru yang pernah ikut pelatihan pendidikan inklusi bukan

berdasarkan kualifikasi pendidikan luar biasa. Untuk guru yang ada anak inklusi di kelas masih ada anak diberi tugas menulis tidak disesuaikan dengan materi yang diberikan guru terhadap anak reguler di kelas itu, dengan kata lain guru menangani anak kurang optimal menunaikan kewajiban, tidak mengikuti standar yang ada dalam penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Komponen sarana prasarana di SDN Pengadegan 07 Pagi adalah bahwa sarana prasarana yang digunakan anak berkebutuhan khusus sama seperti yang digunakan anak pada umumnya dan di SDN Pengadegan 07 Pagi tidak tersedia tenaga profesional, dokter, psikolog atau tenaga okupasi, sedangkan daya dukung lingkungan dan orang tua dalam mendukung program inklusi sangat mendukung terlihat dari pernah adanya anak yang keluar dari lokasi sekolah kemudian diantar oleh masyarakat sekitar kembali ke sekolah karena tidak ada orang tua yang protes di sekolah SDN Pengadegan 07 Pagi ada anak berkebutuhan khusus. Mengenai standar kelulusan di SDN Pengadegan 07 Pagi sudah mengikuti kriteria standar program pendidikan inklusi karena terlihat dari hasil yang didapat sekolah dalam hal kelulusan anak berkebutuhan khusus harus lulus dan dalam standar pengelolaannya menggunakan cara ketika pelaksanaan ujian anak tersebut tidak mengikuti ujian standar tetapi diberikan soal berbeda dari anak reguler.

Soal yang diberikan dibuat langsung oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelasnya dan sebelumnya dikonsultasikan kepada kepala sekolah beserta guru lainnya. Mengenai komponen standar pembiayaan terlihat ada ketimpangan karena tidak adanya dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dana pembiayaan anak berkebutuhan khusus sebaiknya dapat disusun pada RKAS karena terdapat anak berkebutuhan khusus maka harus ada sarana atau alat yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan program pendidikan inklusi di SDN Pengadegan 07 Pagi.

Dari hasil tabel di atas peneliti menggambarkan tingkat ketercapaian program pendidikan inklusi di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi adalah sebagai berikut: Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi termasuk kategori cukup baik, tingkat ketimpangan terletak pada tidak adanya silabus yang dibuat khusus dan tidak adanya kurikulum, tetapi kemudian ditambah masukkan dari internet dan masukkan dari guru, dan tidak adanya guru membuat *assessment* yang berguna untuk menindak lanjuti solusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Guru juga tidak membuat PPI yang berguna untuk memantau kemajuan anak berkebutuhan khusus. Hasilnya adalah di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi tidak memiliki dokumen silabus yang khusus, tidak memiliki kurikulum yang dimodifikasi, tidak memiliki dokumen PPI (Program Pembelajaran Individu) karena baik guru pembimbing khusus dan guru kelas tidak membuat dokumen tersebut, sehingga yang tidak terlaksana Program pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar program. Dari komponen standar isi pencapaian jauh dari standar program pendidikan inklusi yang ada.

Komponen standar kelulusan sangat tinggi tidak terdapat ketimpangan karena anak berkebutuhan khusus harus lulus dengan syarat soal dibuat guru sesuai dengan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus harus naik ke jenjang kelas berikutnya. Mengenai kompetensi penilaian terdapat ketimpangan yaitu guru menggunakan penilaian yang sesuai dengan prosedural sebelum melakukan penilaian guru sudah menyesuaikan indikator terlebih dahulu dengan merendahkan indikator soal tersebut.

Komponen standar proses penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi sudah sesuai dengan standar guru dalam penerimaan PPDB mengikuti aturan yang ada yaitu melalui PPDB *online* dan orang tua diminta membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menerangkan tentang hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Komponen standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan 100%, guru-guru

yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus tidak ada satu guru yang berkualifikasi pendidikan khusus. Guru-guru di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi hanya mendapatkan pelatihan satu kali tetapi sudah beberapa guru diikuti sertakan dalam pelatihan yang diadakan dari Dinas Pendidikan maupun dari pihak terkait lainnya.

Penunjukkan guru pendamping khusus berdasarkan guru yang pernah ikut pelatihan pendidikan inklusi bukan yang memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa. Untuk guru yang ada anak inklusi di kelas anak diajarkan juga pada waktu luang guru melakukan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus. Komponen sarana prasarana di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi adalah bahwa sarana prasarana yang digunakan anak berkebutuhan khusus sama seperti yang digunakan anak pada umumnya dan masih minim karena saat ini sedang menumpang di sekolah lain. SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi tidak tersedia tenaga profesional, dokter, psikolog atau tenaga okupasi, sedangkan daya dukung lingkungan dan orang tua dalam mendukung program inklusi sangat mendukung karena tidak ada orang tua yang protes di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi ada anak berkebutuhan khusus.

Mengenai standar kelulusan di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi sudah mengikuti kriteria standar program pendidikan inklusi karena terlihat dari hasil yang didapat sekolah dalam hal kelulusan anak berkebutuhan khusus harus lulus dan dalam standar pengelolaannya menggunakan cara ketika pelaksanaan ujian anak tersebut tidak mengikuti ujian standar tetapi diberikan soal berbeda dari anak reguler.

Soal yang diberikan dibuat langsung oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelasnya dan sebelumnya dikonsultasikan kepada kepala sekolah beserta guru lainnya. Mengenai komponen standar pembiayaan terlihat ada ketimpangan karena tidak adanya dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus dimana dana pembiayaan anak berkebutuhan khusus sebaiknya dapat disusun pada RKAS karena terdapat anak berkebutuhan khusus maka harus ada sarana atau alat yang

dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan program pendidikan inklusi misalnya dibelikan buku penunjang, alat bermain. Pelaksanaan program inklusi yang peneliti lihat tidak adanya buku penunjang di SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi.

Dari hasil tersebut peneliti menggambarkan tingkat ketercapaian program pendidikan inklusi di SDN Klender 12 Pagi adalah sebagai berikut: Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Klender 12 Pagi termasuk kategori sangat baik tidak adanya tingkat ketimpangan pada silabus telah dibuat khusus dan adanya kurikulum yang dimodifikasi, guru membuat *assessment* yang berguna untuk menindak lanjuti solusi bagi anak berkebutuhan khusus. Guru juga membuat PPI (Program Pembelajaran Individu) yang berguna untuk memantau kemajuan anak berkebutuhan khusus dan terlihat sudah ada perkembangan dari anak yang tidak dapat meraba sudah dapat meraba sehingga saraf sensoriknya lebih bagus. Ada anak yang HDHD sangat aktif dan tidak dapat mengontrol emosinya sekarang sudah banyak perubahannya.

Hasilnya adalah di SDN Klender 12 Pagi memiliki dokumen silabus yang khusus, memiliki kurikulum yang dimodifikasi, memiliki dokumen PPI (Program Pembelajaran Individu) karena baik guru pembimbing khusus dan guru kelas membuat dokumen tersebut, sehingga sudah terlaksana Program pendidikan inklusi berdasarkan kriteria standar program. Dari komponen standar isi pencapaian sudah mengikuti standar program pendidikan inklusi yang ada. Komponen standar kelulusan sangat tinggi tidak terdapat ketimpangan karena anak berkebutuhan khusus harus lulus dengan syarat soal dibuat guru sesuai dengan jenis hambatan anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus harus naik ke jenjang kelas berikutnya.

Mengenai kompetensi penilaian tidak terdapat ketimpangan yaitu guru menggunakan penilaian yang sesuai dengan prosedural di mana sebelum melakukan penilaian guru harus menyesuaikan indikator terlebih dahulu kemudian merendahkan indikator tersebut apabila masih menemukan hambatan. Komponen standar proses

penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SDN Klender 12 Pagi terjadi ketimpangan karena dalam penerimaan PPDB tidak mengikuti aturan yang ada yaitu dalam PPDB, penerimaan anak berkebutuhan khusus melebihi kuota yang ditetapkan yang seharusnya kuota tidak melebihi 2 tetapi satu kelas ada bahkan mencapai 8 anak berkebutuhan khusus.

Guru di SDN Klender tidak mampu menolak disebabkan orang tua tetap menginginkan anaknya masuk di sekolah SDN Klender 12 Pagi. Ketika PPDB orang tua iundang untuk diberi sosialisasi mengenai syarat yang diminta yaitu membawa surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menerangkan tentang hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Komponen standar kompetensi guru di SDN Klender 12 Pagi sudah mendapatkan pelatihan yang diadakan dari Dinas Pendidikan, Kementerian PKLK, bahkan dari CIAE selama 10 bulan.

Penunjukkan guru pendamping khusus berdasarkan guru yang pernah ikut pelatihan pendidikan inklusi, karena tidak adanya guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa. Untuk guru yang ada anak inklusi di kelas anak berkebutuhan khusus sudah diajarkan sesuai dengan materi yang diberikan guru terhadap anak berkebutuhan khusus dengan indikator yang diturunkan sesuai jenis hambatannya. dengan kata lain guru menangani anak berkebutuhan khusus sudah mengikuti standar yang ada dalam penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Tujuan agar anak mau datang ke sekolah bersosialisasi dan belajar sudah ada terlihat di SDN Klender 12 Pagi. Komponen sarana di SDN Klender 12 Pagi adalah bahwa sarana prasarana yang digunakan anak berkebutuhan khusus sama seperti yang digunakan anak pada umumnya tetapi sekolah juga menyediakan sarana prasarana berupa pasir yang digunakan bagi anak yang lemah syaraf motoriknya. di SDN Klender 12 Pagi tidak tersedia tenaga profesional, dokter, psikolog atau tenaga okupasi, sedangkan daya dukung lingkungan dan orang tua dalam mendukung program inklusi sangat mendukung

karena tidak ada orang tua yang protes di sekolah ini ada anak berkebutuhan khusus.

Mengenai standar kelulusan di SDN Klender 12 Pagi sudah mengikuti kriteria standar program pendidikan inklusi karena terlihat dari hasil yang didapat sekolah dalam hal kelulusan anak berkebutuhan khusus harus lulus dan dalam standar pengelolaannya menggunakan cara ketika pelaksanaan ujian anak tersebut tidak mengikuti ujian standar tetapi diberikan soal berbeda dari anak normal. Soal yang diberikan dibuat langsung oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelasnya dan sebelumnya dikonsultasikan kepada kepala sekolah beserta guru lainnya.

Mengenai komponen standar pembiayaan tidak terlihat ada ketimpangan karena adanya dana khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dana pembiayaan anak berkebutuhan khusus ada disusun pada RKAS karena terdapat anak berkebutuhan khusus maka harus ada sarana atau alat yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan program pendidikan inklusi misalnya dibelikan pasir untuk terapi, media lainnya yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus, buku penunjang penyelenggaraan program inklusi yang peneliti lihat adanya buku penunjang di SDN Klender 12 Pagi.

BAGIAN 9

Upaya untuk Mengatasi Kendala Dalam Penyelenggaraan Program Inklusi

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Standar Isi

Untuk mengatasi hambatan pada komponen standar isi, guru-guru diberikan pelatihan lebih sering dengan waktu yang lebih lama sehingga tenaga pendidik lebih mengerti apa saja yang harus mereka siapkan pada saat proses belajar mengajar dan perangkat apa saja yang harus ada dalam program pendidikan inklusi dan lebih banyak lagi buku panduan dalam mempersiapkan administrasi bagi guru-guru.

2. Standar Proses.

Lebih sering lagi adanya komunikasi antara guru pendamping khusus, guru kelas, kepala sekolah dengan orang tua murid anak berkebutuhan khusus, sehingga guru kelas tidak kesulitan menghadapi anak berkebutuhan khusus,

3. Standar Penilaian.

Sekolah menetapkan standar penilaian yang telah menjadi standar yaitu tetap menggunakan standar penilaian yang umum hanya bobot KKM yang isinya tidak sama dengan anak reguler harus ada kesepakatan dan penetapan dari sekolah yang dibukukkan atau ditetapkan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi untuk standar penilaian.

4. Standar kelulusan

Standar kelulusan tidak mengalami kendala jika sudah sesuai dengan standar program pendidikan inklusi.

5. Standar Kompetensi Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing khusus masih belum memenuhi kriteria standar program pendidikan inklusi. Guru pembimbing khusus tidak berdasarkan siapa yang pernah pelatihan tetapi berdasarkan kualifikasi pendidikan luar biasa,

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana prasarana masih menggunakan sarana dan prasarana yang umum tidak ada yang khusus, sarana prasarana ada bagi anak berkebutuhan khusus sebaiknya dibelikan alat permainan yang dapat merangsang syaraf motorik bagi anak berkebutuhan khusus.

7. Standar Pengelolaan.

Pengelolaan dalam sekolah inklusi sebaiknya kepala sekolah menunjuk koordinator inklusi yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan inklusi sehingga koordinator ini yang akan menjadi penyambung lidah ke kepala sekolah atau dinas terkait tentang semua permasalahan yang ada di sekolah inklusi.

8. Standar Pembiayaan

Melalui koordinator inklusi standar pembiayaan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dianggarkan dan dimasukkan dalam RKAS.

BAGIAN 10

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menetapkan rumusan masalah dengan metode penelitian yang ditetapkan yaitu model DEM (*Descrapany Evaluation Model*) pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen, wawancara serta observasi.

Melalui kajian pada hasil penelitian dan pembahasan yang cukup rinci, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Inklusi di SDN Kapuk Muara 03, SDN Cengkareng Barat 03 Pagi, SDN Pengadegan 07 Pagi, SDN Cempaka Putih Barat 09 Pagi penyelenggaraannya belum sesuai dengan standar Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, dan Pergub Nomor 116 Tahun 2007.
2. Program Pendidikan Inklusi di SDN Klender 12 Pagi sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan Pergub Nomor 116 Tahun 2007.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana di lima SD negeri DKI Jakarta masih dibawah standar Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.
4. Ketimpangan penyelenggaraan terjadi faktor terbesar karena belum siapnya sekolah melaksanakan Pergub Nomor 116 tahun 2007.

5. Ketimpangan pelaksanaan program pendidikan inklusi terjadi pada ketentuan jenis ratio dan deskripsi pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

B. Implikasi

Penelitian ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan pembahasan temuan data penelitian, hasilnya memiliki konsekwensi logis terhadap masing-masing aspek kajian. Implikasi yang pengembangan tindak lanjut untuk perubahan ke arah perbaikan penyelenggaraan program pendidikan inklusi adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini memberi masukan beberapa langkah perbaikan, dimulai dengan diberikan pelatihan bagi guru-guru dan kepala sekolah dengan intensitas waktu yang lebih lama lagi; perlunya melengkapi sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus dilengkapi agar mereka lebih optimal menerima pelajaran dari guru.
2. Sekolah dapat melakukan upaya untuk memenuhi Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan No 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana dengan cara menganggarkan dari dana BOS atau BOP pada RKAS.
3. Kurikulumnya sebaiknya ditambahkan indikator keterampilan yang lebih banyak bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat memiliki keahlian atau keterampilan untuk bekal di masa depan.
4. Kepala Sekolah sebaiknya menunjuk koordinator guru inklusi sebagai penyambung lidah apa yang dibutuhkan guru-guru untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar.

C. Rekomendasi

Agar Penyelenggaraan program pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan optimal maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kebijakan yang dituangkan dalam Pergub Nomor 116 Tahun 2007 sudah menunjukkan pada pendidikan untuk semua, tetapi alangkah lebih bijak lagi jika peraturan tersebut juga diimbangi dengan pemberian dana khusus bagi pengembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, Guru-gurunya diharapkan dipersiapkan terlebih dahulu agar pelaksanaannya mereka tidak sekedar menunaikan kewajiban saja untuk memenuhi Pergub, Sarana dan prasaranasebaiknya dilengkapi agar anak berkebutuhan khusus syaraf motoriknya lebih berkembang, diharapkan tersedianya kurikulum tersendiri yang di dalamnya berisi tentang berbagai keterampilan yang dapat membantu anak tersebut dapat berdiri di atas kakinya sendiri.

2. Rekomendasi Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai manajer diharapkan tetap mendukung program pendidikan inklusi dengan mau membantu pemerintah memasukkan anggaran bagi program pendidikan inklusi sekiranya masuk dalam RKAS.

3. Rekomendasi Bagi Guru

Guru kelas atau juga guru pembimbing khusus diharapkan meluangkan waktunya di luar jam ngajar untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- al., D. B. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Al-Jufri, H. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Jakarta: SmartGrafika,.
- 7Toprangingblog. 2013, 2 07. *7 Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli*. Retrieved 7 2, 2018, from def: [html//www.7topranging.com](http://www.7topranging.com)
- Arifin, Z. 2011. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, .* Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Brinkerhoff, R. O. 1983. *Program Evaluation, a practitioner's guide for trainers and educational*. USA: Boston, p, xv.
- Buana. n.d.. *Ujian Nasional: Penilaian atau Evaluasi*. Retrieved Januari 25, 2018, from www.fajar.co.id/news.php/.
- Chaerunnisa, C. 2016. *Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif*. Jakarta: PT.Grafindo Raja Persada.
- Deleon, P. 2006. *The Oxford Handbook of Public Policy* . Newyork: Oxford University Press Inc.
- Deleon., P. 2008. *The oxford Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University Press Inc.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik di terjemahkan oleh Samodra Wibawa,dkk*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Djaali.et.al. 2004. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs UNJ.
- Dye., T. R. 1976. *Policy Analysis..* Alabama: Alabama university Press.
- Fischer, M. a. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Method*. New York: Taylor and Francis Group.

- Garnida, D. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Pt Reflika Aditama.
- Ghani, A. R. 2014. Handouts Mata Kuliah Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta:Uhamka.
- Hamid Al-Jurfri, S. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Jakarta:Smart Grafika.
- Hartono. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklus. Penggunaan Pendekatan Stake Countenance Model pada SDN Klampias Ngasem 1/246 Surabaya . *Journal Pendidikan dan kebudayaan Vol.16. Edisi Khusus II*, Jakarta..
- Haryono, G. N. 2013. Studi Evaluas Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak.*Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*,
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/645>.
- Illahi., M. T. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Direktorat PKLK Kementerian Pendiikan dan Kebudayaan.

- Khusnuridlo. 2010. *Prinsip-Prinsip Evaluasi Program Supervisi*. Retrieved february 19, 2018, from <http://www.khusnuridlo.com.prinsip-prinsip-evaluasi-program.html>.
- Krippendorff, K. 2004. *Content analysis: An Introduction to its Methodology*. California: Sage Publication, Inc, Thousand Oaks.
- Kurniawan, A. 2015, 8 Jenis, Bentuk dan Pengertian Wawancara Menurut Para ahli Beserta Contohnya, <http://www.gurupendidikan.co.id/8-jenis-bentuk-dan-penge> Pebruari 2018). *8 Jenis Bentuk dan Pengertian wawancara menurut para ahli-beserta contohnya*/. Retrieved Februari 17, 2018, from <http://www.gurupendidikan.co.id/8jenis-bentuk-dan-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli-beserta-contohnya/>.
- Malcolm M. Provus. 1969. *Evaluasi Model, An Approach to local ProgramImprove and Development*. Pittsburg: Pittsburg Public School.
- Mudjito. 2013. Berbagai Peraturan Pendidikan Khusus Dan Lsyana Khusus. Jakarta, hal 85.: Direktotar Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan .
- Parsons, L. d. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Parsons., L. d. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Pendidikan, S. K. 1994. The Salamance statement On Inclusive Education. *Salamance Statement*. Spayol.

Peraturan Pemerintah Tahun 2009.. *tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Direktorat Pembinaan Pendidikan khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Tahun 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

S, D. 2008. Pengkajian Jurnal Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 08(I), [http://puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah-Undangan/DYAH pengkajian pendidikan inklusif](http://puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah-Undangan/DYAH%20pengkajian%20pendidikan%20inklusif.pdf). Pdf. Diakses 16 Februari 2018.

Slamento. 1988. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, L. a. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi dalam Gusti Nono Haryono. 2010. *Studi Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Bagi anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak*.

- Suharsimi, A. &. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadi, M. &. 2013. Improving Teacher Attitude Towards, Understanding of and Competence In Inclusive13(2). *International Conference on Education and Language*, UBL, Indonesia: 303-310.
- Suyanto. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tayibanapis., F. Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Undang-Undang Dasar. 1945. *tentang tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan* . Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hal.12. Pasal 31 ayat 1.
- Usman, H. 2014. Manajemen. In *Teori,Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wirawan. 2016. *Evaluasi, teori, model, methodology, standard, aplikasi dan profesi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

BIONARASI PENULIS

Siti Saroh, lahir di Pandeglang 02 Januari 1969. Pendidikan dasar diselesaikan di SDI Teladan YKPI Jakarta pada tahun 1982, SMP Negeri 122 Jakarta pada tahun 1985 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri 6 Bandengan Utara Jakarta, tahun 1988. Gelar Kesarjanaan diperoleh dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama Jakarta, tahun 1995.



Tahun 2016 Melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Jakarta pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP). Karir sebagai PNS (guru) di SMP Negeri 122 tahun 1995 sampai sekarang. Dalam perjalanan karir peneliti pernah terpilih sebagai guru berprestasi tingkat Jakarta- Utara tahun 2015 dan tahun 2018. Tahun 2016 mendapat undangan dari Kemendikbud untuk mengikuti workshop literasi bagi seluruh guru berprestasi tingkat nasional dan peserta diseminasi literasi bagi guru berprestasi tingkat nasional. Karya ilmiahnya pernah disimposiumkan pada hari guru tahun 2015 di Sentul Bogor. Peneliti menulis karya fiksi berupa novel dengan judul “Malaikat Itu Bermata Sipit” pada tahun 2018 dan buku kearifan Lokal. Menikah dengan Irwanto AlFatah, dikaruniai empat orang anak yaitu Farah Fatacharnisa, Tasya Fatacharmita, Nur Ayu Fatacharini dan Muhamad Kemal Fatacharlan